

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA

Rizky Imades Putra

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The main purpose of this study is to evaluate “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga” programme in Tampan District Pekanbaru City in 2019. This study use primary data and qualitative method is applied. The data is collected from party that involved respectively with direct interview method applied. The study concluded that generally the programme is successful enough in terms of theoretically, but theres some understanding problems in practical aspects. In target aspect, the achievement of the program was right even though in some places there were still obstacles. Timeliness is considered good. In general it can be said that this program has been successfully implemented.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) tahun 2019 di Kecamatan Tampan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diolah dengan metode kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat secara langsung menjalankan program ini dengan metode wawancara langsung. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa secara umum program ini sudah dapat dipahami secara teoritis, namun masih terkendala pada pemahaman praktek. Secara sasaran, pencapaian program sudah tepat meskipun di beberapa tempat masih memiliki kendala. Ketepatan waktu dirasa telah baik. Secara umum dapat dikatakan bahwa program ini cukup berhasil terimplementasi.

Kata Kunci: PMB RW, evaluasi program, Kecamatan Tampan

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat kini telah menjadi agenda penting pemerintah, terutama sebagai kelanjutan dari kegagalan konsep pembangunan masa lalu. Esensi pemberdayaan masyarakat adalah proses dari, oleh dan untuk masyarakat, dimana masyarakat didampingi/ difasilitasi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam pembangunan dan peningkatan taraf hidup mereka, sedang pihak lain hanya berfungsi sebagai fasilitator. Menyadari akan pentingnya masalah pemberdayaan masyarakat ini, Pemko Pekanbaru telah meluncurkan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) yang diharapkan dapat mempercepat peningkatan pembangunan dan ekonomi masyarakat.

Di Kota Pekanbaru, PMB RW sendiri sudah mulai dilaksanakan secara bertahap oleh Pemko Pekanbaru di (93) RW di Kecamatan Tenayan Raya sebagai RW percontohan. Puluhan RW di kawasan itu telah menerima dana PMB RW sebesar Rp50 juta per RW tahun 2014 lalu. Kemudian pada tahun 2015

ini, melalui APBD murni dana serupa juga akan disalurkan kepada (300) RW sasaran yang tersebar di sejumlah kecamatan se-Kota Pekanbaru, dengan total bantuan sebesar Rp 150 miliar. Melalui pelaksanaan program ini, nantinya masyarakat akan merencanakan program, memilih jenis prasarana/sarana sanitasi komunal yang sesuai dengan kebutuhan, menyusun rencana kerja, melakukan pembangunan konstruksi serta mengelola dan melestarikan hasil pembangunan.

Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas pada tingkat lokal. Penggunaan dana ditetapkan melalui rapat musyawarah RW yang nantinya di SK kan dengan surat sebagai lembaga penyelenggara. Dalam rapat musyawarah, RW akan menetapkan kemana dan apa yang harus dibangun sesuai keinginan masyarakat. Tak hanya untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan saja, dana PMB RW juga bisa digunakan dalam bentuk simpan pinjam dan

pembangunan fisik yang mendadak.

Teknis operasional diatur dengan melalui Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru No.44 tahun 2014 tentang PMB RW Kota Pekanbaru. Menurut Ketua RW 06, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Efendi, “program PMB RW merupakan program bagus yang bisa meringankan beban masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dengan program itu, katanya, nanti masyarakat kelompok usaha kecil bisa dimudahkan melalui pinjaman modal dari dana PMB RW”. Karena itu, Efendi sangat menyambut baik program PMB RW yang digulirkan Walikota Pekanbaru H Firdaus MT tersebut. Di mana, program yang pertama kali dicetuskan di kabupaten/kota se-Indonesia itu dinilai langsung menyentuh ke masyarakat khususnya untuk mengembangkan usaha. Ia menyebutkan, “masyarakat yang ada di wilayahnya banyak menggeluti usaha kecil menengah, namun tidak bisa dikembangkan karena terbentur modal”. Maka dengan adanya bantuan Pemko Pekanbaru melalui PMB RW itu sangat membantu sekali di dalam mengembangkan usaha.

Pemko Pekanbaru telah menyiapkan tenaga pendamping sebanyak (128) orang yang diambil dari kalangan sarjana melalui seleksi ketat untuk memastikan program ini berjalan sesuai harapan. Sarjana pendamping yang terpilih akan bekerja selama enam bulan untuk (12) kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Alasan mempekerjakan tenaga pendamping dalam program PMB RW ini mengingat latar belakang pendidikan ketua RW di Pekanbaru sangat beragam. Untuk itu perlu pendamping untuk mengarahkan RW penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dana tersebut secara tepat sasaran. Kecamatan Tampan merupakan wilayah yang mendapatkan alokasi pendanaan PMB-RW paling besar.

Kegiatan fisik yang dilakukan dalam Program PMB RW diantaranya pembuatan atau pembangunan drainase, pembangunan pos ronda, pembangunan posyandu, semenisasi, pembangunan bak penampungan air dan sebagainya. Sedangkan kegiatan non fisik meliputi pelatihan koperasi, pelatihan pengelolaan sampah,

pelatihan tata boga, pelatihan sulam pita, pelatihan pembuatan hidroponik, pelatihan salon, pelatihan tenun, pelatihan las listrik, pelatihan perbengkelan, pelatihan menjahit, pelatihan budidaya ikan, pelatihan bordir, pelatihan penyelenggaraan jenazah dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan melalui Program PMB RW ditujukan untuk memenuhi prinsip program tridaya yaitu pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan lingkungan.

PMB-RW belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, secara substansi, masyarakat yang dilatih belum mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Adapun kegiatan fisik yang belum berjalan, dikarenakan keterbatasan anggaran dari Pemko. Kendala lain adalah kontrak pendamping yang sudah habis serta masih ada pendamping yang tidak sungguh-sungguh dalam bekerja dilihat dari laporan bulanan yang tidak lengkap.

Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan masih terdapat tiga kelurahan yang tidak mematuhi peraturan yang diberlakukan terutama pada masalah administrasi yaitu Kecamatan Simpang Baru, Tuah Karya dan Tuah Madani. Ketiga kelurahan tersebut termasuk kelurahan yang mendapatkan anggaran non-fisik yang besar sehingga pertanggungjawaban secara administrasi terhadap pemerintah perlu untuk diselesaikan. Selain itu, anggaran yang termasuk besar untuk kelurahan-kelurahan tersebut perlu dievaluasi penggunaannya terutama dari pihak pengelola dana maupun masyarakat langsung.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dimana memiliki tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti mulai berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Peneliti diarahkan oleh produk berfikir induktif untuk menemukan jawaban

logis terhadap apa yang sedang menjadi pusat perhatian dalam penelitian dan akhirnya produk berfikir induktif menjadi jawaban sementara terhadap apa yang dipertanyakan dalam penelitian dan yang menjadi perhatian itu (Bungin, 2011). Untuk menilai kajian ini tentunya diperlukan data, baik yang sifatnya data sekunder seperti laporan kerja, dokumen dan semacamnya maupun data primer terutama dari hasil wawancara yang dilakukan. Untuk memperoleh data yang akurat tentunya diperlukan pula teknik pengumpulan data yang tepat, cepat, efisien dan ekonomis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Program (*Program Understanding*)

Pemahaman program adalah kemampuan implementor program dalam mengetahui dengan jelas pelaksanaan program PMB RW yang akan diimplementasikan. Tingkat pemahaman implementor terhadap program yang dilaksanakan juga tergantung kepada tingkat pendidikan sebab tingkat pendidikan yang dimiliki akan membantu dalam proses penterjemahan dan pemahaman terhadap ketercapaian program.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah diperoleh menjelaskan bahwa kemampuan pihak pelaksana program PMB RW dalam memahami program secara teoritis sudah baik tetapi dalam tataran praktis masih belum baik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya program PMB RW yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat, baik dalam bentuk program infrastruktur ataupun program non infrastruktur. Kekurangmampuan pelaksana program PMB RW ini tidak terlepas dari tidak adanya bimbingan teknis yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kota dalam upaya mengimplementasikan program dengan efektif. Padahal keberadaan bimbingan teknis yang dilakukan memberikan peluang kepada pelaksananya, untuk bisa melaksanakan program sesuai dengan tujuan, sasaran dan prinsip program yang sudah ditetapkan. Sebab bimbingan teknis yang diberikan merupakan pengetahuan yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kota dalam

upaya melaksanakan program dengan baik, supaya dalam prakteknya program ini memang memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas. Pengetahuan yang diperoleh akan menggiring para pelaksana program PMB RW dalam merespon setiap kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang ada di lingkungannya. Apabila hal tersebut mampu terlaksana, maka sasaran program PMB RW yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat tercapai.

Oleh karenanya, pemberian bimbingan teknis kepada setiap pelaksana program PMB RW merupakan sesuatu yang penting bagi suksesnya program ini. Modal pengetahuan yang diperoleh, akan sangat membantu pelaksana program PMB RW untuk bisa menyusun laporan pengusulan kegiatan yang akan dilakukan dalam setiap tahunnya. Tentunya bentuk usulan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan rukun warga. Namun sebaliknya apabila bimbingan teknis tidak berjalan atau tidak diberikan oleh Pemerintah Kota, maka tidak semua pelaksana program PMB RW memahami secara teknis pelaksanaan program tersebut.

Tepat Sasaran (*Targeting*)

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa pihak implementor menyatakan bahwa ketepatan sasaran program PMB RW yang dilakukan sudah baik, walaupun dalam prakteknya masih ada beberapa kekurangan-kekurangan dalam pencapaiannya. Artinya ketepatan sasaran yang dilakukan sudah sesuai dengan peruntukkan program PMB RW yang ditetapkan, tetapi dalam implementasinya belum mampu menyentuh seluruh masyarakat atau warga yang ada di lingkungan rukun warga. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang disediakan melalui program PMB RW yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Keterbatasan anggaran yang diberikan membuat setiap kegiatan yang diperuntukkan untuk setiap bidang pada program PMB RW tidak bisa dilakukan dengan baik. Apalagi setiap implementor program PMB RW harus bisa menyusun dan mengusulkan ke-

giatan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Sehingga dalam proses pengusulan yang akan diseleksi oleh Pemerintah Kota, tidak semuanya usulan anggaran yang disampaikan disetujui oleh pihak Pemerintah Kota. Fakta ini membuat implementor program PMB RW harus bijak dan memiliki skala prioritas dalam melaksanakan program yang sudah diperuntukkan.

Tepat waktu (*Promptness*)

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa ketepatan waktu para implementor dalam melaksanakan program PMB RW sudah cukup baik. Artinya pihak implementor program PMB RW sudah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbentuk fisik ataupun non fisik dengan tepat waktu. Dimana ukuran ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan fisik ataupun non fisik adalah penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan. Implementor akan selalu berusaha konsisten dalam menyelesaikan setiap kegiatan fisik ataupun non fisik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sebab kegagalan dalam menyelesaikan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ukuran waktu, akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun-tahun berikutnya. Karena ketepatan waktu implementor dalam menyelesaikan kegiatan akan menjadi ukuran bagi pihak Pemerintah Kota untuk mensetujui kegiatan-kegiatan berikutnya yang diusulkan oleh para implementor program PMB RW. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen bersama diantara para implementor program PMB RW untuk bisa menyelesaikan setiap kegiatan yang sudah disusun, baik dalam bentuk kegiatan fisik ataupun non fisik. Komitmen yang dimiliki akan menjadi modal yang kuat bagi setiap implementor untuk dapat menyelesaikan kegiatan yang direncanakan dengan tepat waktu.

Kendala bagi implementor dalam menyelesaikan kegiatan yang tepat waktu adalah pada proses penyusunan laporan kegiatan yang sudah dilakukan. Hampir setiap pelaksana program PMB RW mengeluhkan proses penyusunan laporan penyelesaian kegiatan yang

sudah dilakukan. Karena tidak semua implementor memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan laporan kegiatan yang telah dilakukan. Ketidakmampuan ini yang menjadi halangan dan hambatan bagi implementor untuk bisa menyelesaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Faktor lain yang menjadi hambatan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban kegiatan adalah tidak adanya bimbingan teknis yang diberikan dalam penyusunan laporan yang dibebankan.

Tercapainya Tujuan (*Achievement of Goals*)

Tercapainya tujuan adalah kemampuan implementor dalam merealisasikan tujuan program PMB RW yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Setiap program kebijakan pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, bahkan ketercapaian tujuan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pelaksanaan program. Apabila tujuan program tercapai, maka program kebijakan itu berhasil dilaksanakan, namun sebaliknya apabila tujuan program tidak tercapai maka kegagalan dalam melaksanakan program.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa ketercapaian tujuan dalam implementasi program PMB RW di Kecamatan Tampan sudah berjalan dengan baik atau efektif. Walaupun fokus pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh program PMB RW, lebih diarahkan kepada bidang lingkungan dan ekonomi. Kemampuan para implementor program PMB RW dalam merealisasikan tujuan di bidang lingkungan dan ekonomi tidak terlepas dari ketepatan prioritas yang disusun terhadap kebutuhan masyarakat akan program PMB RW. Fokus ketercapaian tujuan pada bidang lingkungan ditekankan kepada perbaikan dan perawatan saluran air atau parit yang dimiliki oleh warga di lingkungannya. Sebab apabila tidak dilakukan perawatan dan perbaikan maka dapat menciptakan banjir dan genangan air pada saat musim penghujan tiba.

Kondisi ini akan membuat lingkungan kehidupan warga menjadi kurang sehat dan tidak bersih. Akibatnya banyak penyakit yang

akan muncul apabila keadaan tersebut tidak segera diperbaiki dan dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, pihak implementor program PMB RW lebih menekankan pembangunan fisik atau infrastruktur yang dilakukan pada perbaikan saluran air atau parit untuk memperlancar pembuangan air di sekitar lingkungan warga. Kemudian fokus ketercapaian tujuan yang lain adalah di bidang ekonomi, dimana implementor program PMB RW memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya mengembangkan kemampuan warganya untuk bisa merangsang kegiatan ekonomi yang dikelola.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan memang lebih fokus kepada kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Hal ini disebabkan oleh prinsip yang ingin memberikan ketrampilan dan keahlian kepada kaum perempuan dalam membantu perekonomian keluarga. Oleh karenanya, kegiatan pelatihan yang dilakukan lebih cenderung kepada peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi kaum perempuan seperti pelatihan menjahit, pelatihan merangkai bunga, pelatihan membuat kue, pelatihan menyulam, pelatihan salon dan sebagainya. Sedangkan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada kaum laki-laki yang tidak terlalu banyak diberikan dalam peningkatan keahlian di bidang perbengkelan, perikanan dan sebagainya.

Perubahan Nyata (*Apparent Change*)

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa dampak perubahan nyata yang diharapkan dari implementasi program PMB RW belum berjalan dengan efektif. Artinya implementasi program PMB RW yang dilakukan dalam setiap tahunnya belum memberikan dampak perubahan yang nyata dalam kehidupan warga di lingkungan rukun warga. Hal ini dikarenakan oleh anggaran pembiayaan yang terbatas dan tidak berkelanjutan dalam setiap tahunnya. Fakta perubahan yang nyata dirasakan oleh warga terdapat pada program kegiatan yang berbentuk fisik atau pembangunan infrastruktur. Kondisi ini disebabkan bahwa pembangunan fisik atau infrastruktur yang dilakukan barangnya nyata dan bisa dilihat oleh warga.

Selain itu juga warga masyarakat bisa merasakan langsung dampak perubahan yang terjadi melalui kegiatan pembangunan fisik tersebut. Masyarakat bisa menggunakan langsung apa yang sudah dibangun oleh implementor dalam program PMB RW. Beda halnya dengan pembangunan yang sifatnya non fisik, warga masyarakat tidak bisa merasakan dampak perubahannya secara langsung. Karena membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan dan panjang untuk melihat perubahan yang nyata. Pemberdayaan di bidang ekonomi misalnya, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui dampak perubahan yang nyata dari kehidupan warga masyarakat. Kegiatan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada masyarakat tentunya hanya sekedar ilmu pengetahuan dan keahlian yang diperoleh dalam upaya merangsang para warga masyarakat untuk membantu atau memperbaiki perekonomiannya. Apakah para warga masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan memiliki keinginan untuk menggunakan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dalam upaya menambah pendapatan keluarga semuanya tergantung kepada warga tersebut. Sehingga keberhasilan dalam pemberdayaan di bidang ekonomi tidak sekedar pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan saja tetapi sampai pada tahapan keberhasilan dalam tahapan dampak perubahan yang nyata dalam kehidupannya.

Dari keseluruhan tanggapan informan yang sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi program PMB RW di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 masih berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa indikator yang sudah berjalan dengan baik dan ada indikator yang berjalan dengan kurang baik. Pertama, Indikator pemahaman program ditemukan bahwa pihak pelaksana program PMB RW dalam memahami program secara teoritis sudah baik tetapi dalam tataran praktis masih belum baik. Kedua, indikator ketepatan sasaran ditemukan pihak implementor menyatakan bahwa ketepatan sasaran program PMB RW yang dilakukan sudah baik, walaupun dalam prakteknya masih ada beberapa

kekurangan-kekurangan dalam pencapaiannya. Ketiga, indikator ketepatan waktu ditemukan bahwa ketepatan waktu para implementor dalam melaksanakan program PMB RW sudah cukup baik. Artinya pihak implementor program PMB RW sudah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbentuk fisik ataupun non fisik dengan tepat waktu. Keempat, indikator tercapainya tujuan ditemukan bahwa ketercapaian tujuan dalam implementasi program PMB RW di Kecamatan Tampan sudah berjalan dengan baik atau efektif. Walaupun fokus pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh program PMB RW, lebih diarahkan kepada bidang lingkungan dan ekonomi. Kelima, indikator perubahan nyata ditemukan bahwa dampak perubahan nyata yang diharapkan dari implementasi program PMB RW belum berjalan dengan efektif.

Faktor-faktor yang Menghambat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga

Dari beberapa faktor penghambat yang ditemukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa faktor yang dominan menghambat evaluasi program PMB RW di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 adalah faktor bimbingan teknis. Faktor ini merupakan faktor internal yang ada dalam proses implementasi program PMB RW yang dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018. Ketidadaan bimbingan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap setiap RW yang akan melaksanakan program, membuat kegiatan program PMB RW yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga ketidadaan bimbingan teknis yang diberikan membuat beberapa RW kewalahan atau kesulitan untuk bisa melaksanakan program, baik dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kondisi ini harus benar-benar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengimplementasikan program ini kedepannya. Sebab program PMB RW pada dasarnya merupakan program inovatif yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemberdayaan dari level bawah atau bottom up, sehingga nantinya program kegiatan yang

disusun memang merupakan kebutuhan dari masyarakat dan pemecahan permasalahan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Oleh karenanya kedepan, pembekalan dan bimbingan teknis terhadap setiap RW dalam melaksanakan program PMB RW itu menjadi sesuatu hal yang wajib, supaya program tersebut dapat tepat sasaran, tepat tujuan dan tepat guna dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakat.

SIMPULAN

Evaluasi program PMB RW di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 masih berjalan dengan cukup baik. Faktor-faktor yang menghambat evaluasi program PMB RW di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 yaitu faktor bimbingan teknis, faktor SDM implementor program dan faktor keterbatasan anggaran program. Sedangkan faktor yang paling dominan menghambat evaluasi program PMB RW di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 adalah faktor bimbingan teknis.

DAFTAR RUJUKAN

- Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Charles O Jones. 1970. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Mattew B. Miles and A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI – Press. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elek Media Komputindo. Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit Alaf Riau. Pekanbaru.